

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Otonomi daerah merupakan hak dan wewenang pemerintah daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri. Dengan diberlakukannya otonomi daerah berarti memperkuat fungsi pemerintah daerah dalam mengambil dan membuat kebijakan guna mencapai sebuah tujuan daerahnya masing-masing. Salah satu tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ukuran keberhasilan otonomi daerah adalah dengan terwujudnya kehidupan yang lebih baik, lebih adil dalam memperoleh penghasilan/pendapatan, terlindungnya dari segala gangguan, dan terciptanya rasa aman dan lingkungan hidup yang nyaman (Widjaja, 2014).

Pemekaran daerah merupakan salah satu dari konsekuensi kebijakan otonomi daerah, pemekaran daerah juga berarti memberi kesempatan daerah untuk membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Pemekaran daerah ini memungkinkan dilakukannya percepatan pembangunan infrastruktur sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Dengan demikian, pemekaran daerah seharusnya terus meningkatkan kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Pemekaran wilayah juga seharusnya membawa dampak yang positif dalam penurunan angka kemiskinan dengan senantiasa

melakukan pemberdayaan daerah dengan aktif menggali, mengolah dan mengembangkan setiap potensi yang ada di daerah agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hubungannya dengan kemiskinan adalah pemerintah daerah diberikan wewenang bebas untuk membentuk lapangan kerja dan program kerja yang bisa membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan memanfaatkan potensi yang ada di daerah tersebut. Tetapi tidak semua pemekaran desa benar-benar mengatasi masalah masalah kemiskinan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Sapi'i, Makmur, 2014). Setiap kebijakan pasti memiliki dampak positif dan negatifnya. Hal ini dibuktikan berdasarkan penelitian di desa pecahan yaitu Desa Bagoerejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. Semenjak dilakukan pemekran desa di Desa Bagoerejo hal-hal positif banyak berdampak di desa ini, yaitu pengaspalan jalan, pembangunan posyandu, pembangunan pasar dan lain-lain, sementara dampak negatif dari pemekaran desa yaitu kesenjangan perolehan pendapatan perekonomian menjadi tidak merata, hal ini disebabkan pembangunan antar wilayah juga tidak merata diantaranya pembangunan infrastruktur jalan yang kurang ditingkatkan tiap tahunnya di Desa Bagoerejo ini.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2012, pada tahun 2012 lalu Kecamatan Moro merupakan Kecamatan yang paling banyak melakukan pemekaran desa dibandingkan kecamatan yang lain di Kabupaten Karimun. Pada tahun 2012 lalu Kecamatan Moro telah memekarkan desa sebanyak 4 desa baru. Hal ini merupakan sesuatu masalah yang menarik untuk

diteliti, hal ini disebabkan karena melihat data kemiskinan di Kecamatan Moro dari data tahun 2014 sampai 2019 tidak ada perubahan jumlah keluarga miskin, dengan total jumlah 1.401 keluarga

Tabel 1.2 Jumlah Keluarga Miskin Di Kecamatan Moro

No	TAHUN	JUMLAH KELUARGA
1	2016	1401
2	2017	1401
3	2018	1401
4	2019	1401

(Sumber Kantor Camat Kecamatan Moro)

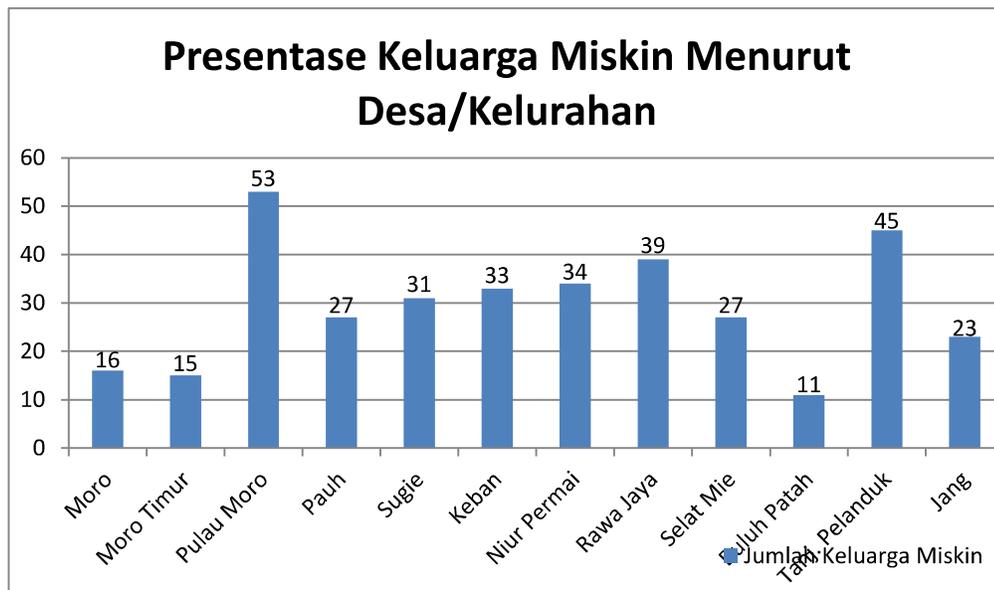
Dari data tabel diatas dapat dijelaskan bahwa angka kemiskinan di kecamatan Moro ini tiap tahunnya relatif stagnan, hal ini dapat dilihat dari data tahun 2016-2019. Belum diketahui seacara pasti apa penyebabnya, hadirnya penelitian ini adalah untuk melihat apakah penurunan kemiskinan di Kecamatan Moro ini disebabkan oleh kebijakan pemekaran desa yang dilakukan serentak pada tahun 2012 lalu atau bahkan disebabkan oleh faktor lain.

Tabel 1.2 Jumlah Dan Persentase Keluarga Miskin Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Moro Tahun 2019

No	Nama Desa	Jumlah Rumah Tangga Keseluruhan	Jumlah Keluarga Miskin	Persentase
1	Moro	1.178	194	16
2	Moro Timur	959	149	15
3	Pulau Moro	258	137	53
4	Pauh	415	114	27
5	Sugie	488	154	31
6	Keban	364	122	33
7	Niur Permai	314	108	34
8	Rawa Jaya	246	96	39
9	Selat Mie	443	68	27
10	Buluh Patah	186	21	11
11	Tanj. Pelanduk	222	101	45
12	Jang	573	137	23
13	Jumlah	5.646	1.401	24

(Sumber: Kantor Camat Kecamatan Moro)

Grafik 1.3 Presentase Jumlah Keluarga Miskin Di Kecamatan Moro Tahun 2019



(Sumber: Kantor Camat Kecamatan Moro)

Dari grafik 1.3 diatas dapat dikatakan bahwa kecamatan Moro ini memiliki jumlah desa dan kelurahan sebanyak 12 desa. Dari ke 12 desa tersebut desa Pulau Moro memiliki jumlah presentasi keluarga miskin terbanyak, yaitu mencapai 53% dari total jumlah keseluruhan keluarga, sedangkan Desa Buluh Patah sendiri memiliki persentase jumlah keluarga miskin paling sedikit jika dibandingkan dengan desa desa lain, desa ini memiliki persentase 11% jumlah keluarga miskin dari total keseluruhan keluarga.

Terkait masalah kemiskinan ini, sudah banyak para ilmuwan yang meneliti, baik dari penyebab sampai ke solusi dalam mengatasi kemiskinan dalam jangkauan wilayah desa maupun nasional, dalam hal ini penulis membagi ke dalam 5 kelompok penelitian terkait dampak sebuah kebijakan dalam menurunkan angka kemiskinan di wilayah pedesaan yaitu *Pertama*, penelitian yang membahas dampak kebijakan pemekaran terhadap pembangunan infrastruktur. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Sagay, Dua, & Tenga, 2018), (Imam Sapi'i, 2013), (Siti Nusantara Bakti, 2018), (Made Mudana, Tibertius Nempung, 2016) dan (Nur Lailatul Amubarokah 2015). *Kedua*, penelitian yang membahas tentang program pembangunan ekonomi masyarakat seperti penelitian yang dilakukan oleh (Neti & Cahyadinata, 2016), (Ratri Furry P.R & Hadi Susana, 2014) dan (Hakim, Hamidi, & Tampubolon, 2017). *Ketiga*, Terkait Program Pengentasan Kemiskinan Seperti Penelitian Yang Dilakukan Oleh (Murdiansyah, 2014), (Rosalia Indriyati, 2015), (Intan Mala Sari & Muhamad Faisal Abdullah, 2017), (Atma Ras, 2013), (Putra & Abbas, 2019) dan (Arif Eko Wahyudi & Ahmad Riyadh, 2014). *Kempat*, Penelitian Terkait Sreategi

Penurunan Angka Kemiskinan (Nur Firdaus, 2014), (Margo Tando, 2016), (Putra & Abbas, 2019) dan (Ahmad Soleh, 2014). Kelompok penelitian. *Kelima*, yaitu terkait dampak pemekaran desa dalam mensejahterakan masyarakat seperti penelitian yang dilakukan oleh, (Huda & Nurani, 2019), (Murdiansyah, 2014), (Nuraeni, Nasir, Asrian, 2019) dan (Muhammad Ikram, 2019). Pada saat ini sudah banyak yang melakukan penelitian sebelumnya terkait dampak pemekaran desa. Penelitian dimaksud adalah penelitian yang dilakukan oleh (Huda & Nurani, 2019), (Murdiansyah, 2014), (Nuraeni, Nasir, Asrian, 2019) dan (Muhammad Ikram, 2019).

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas yang membahas terkait masalah kemiskinan, tetapi hanya sedikit yang membahas tentang dampak dari sebuah kebijakan pemekaran desa yang berangkat dari otonomi daerah dalam mengurangi angka kemiskinan. Melihat kondisi kemiskinan di Kecamatan Moro ini yang belum memiliki jumlah penurunan angka kemiskinan di tahun-tahun sebelumnya, sangat di sayangkan bahwa sangat sedikit yang meneliti terkait masalah kemiskinan di Kecamatan Moro, terutama setelah dilakukannya pemekaran desa, yang memang pemekaran desa ini dilakukan serentak pada tahun 2012 lalu. Pentingnya penelitian ini dilakukan karena bertujuan untuk untuk menganalisis dan mendalami bagaimana dampak pemekaran desa dalam mengurangi angka kemiskinan di beberapa desa di kecamatan Moro dan mengarah kepada bagaimana perkembangan desa ini setelah mekar khususnya untuk mengurangi angka kemiskinan

Berdasarkan beberapa tujuan dan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mendalami dan menganalisis terkait masalah kemiskinan di Kecamatan Moro. Agar hasil penelitian ini menjadi sebuah acuan bagi pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan didaerahnya dan menjadi sumber bacaan kedepannya bagi masyarakat dan para peneliti selanjutnya. Berdasarkan latar belakang diatas, dengan tema pengentasan kemiskinan. Karena salah satu tujuan utama pemekaran desa adalah untuk mengentasi kemiskinan. Maka penulis mengangkat sebuah judul penelitian yaitu: **Analisis Dampak Pemekaran Desa Di Kecamatan Moro Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan.**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

Bagaimana dampak pemekaran desa dalam mengurangi angka kemiskinan di beberapa desa di Kecamatan Moro?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendalami bagaimana dampak pemekaran desa dalam mengurangi angka kemiskinan di beberapa desa di kecamatan Moro.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan ini di bagi menjadi dua, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan pengetahuan mengenai dampak pemekaran desa dalam megurangi angka kemiskinan di Kecamatan Moro.

2. Memberikan pengetahuan mengenai kondisi kemiskinan di Kecamatan Moro pada saat ini.
3. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dengan judul yang relevan dengan penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi wilayah Kecamatan Moro sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan dalam menanggulangi masalah kemiskinan berdasarkan wilayah pedesaan.
2. Bagi masyarakat, merubah cara pandang masyarakat, mengingat pentingnya peran masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pembangunan wilayah mereka agar terciptanya masyarakat yang sejahtera.
3. Bagi Universitas Putera Batam sebagai pengembangan ilmu pengetahuan untuk dapat mengetahui bagaimana dampak kebijakan pemekaran desa di Kecamatan Moro dalam mengurangi angka kemiskinan dan sebagai sumber pengetahuan bagi penelitian di masa yang akan datang.